

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, ANGKA HARAPAN HIDUP DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI DKI JAKARTA

Michael Yohanes Sihombing¹, Josep B Kalangi², Irawaty Masloman³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail : mickael.yoyo@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran pada saat ini merupakan salah satu permasalahan yang belum terpecahkan khususnya pada negar berkembang seperti Indonesia. Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, DKI Jakarta juga menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Perbandingan tingkat pengangguran di DKI Jakarta dan tingkat pengangguran nasional Indonesia dari tahun 2004 - 2023 mengungkapkan permasalahan signifikan, yaitu angka pengangguran di Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series periode 2004-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Data diolah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Angka Harapan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Secara simultan tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pengangguran, Pendidikan, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum, DKI Jakarta

ABSTRACT

Unemployment remains an unresolved issue, particularly in developing countries such as Indonesia. As the economic and business center of the nation, DKI Jakarta also faces significant employment challenges. A comparison of the unemployment rate in DKI Jakarta with the national unemployment rate from 2004 to 2023 reveals a concerning trend: the unemployment rate in Jakarta consistently exceeds the national average. This study aims to analyze the influence of education level, life expectancy, and provincial minimum wage on the open unemployment rate in DKI Jakarta Province. The research utilizes secondary time series data for the period 2004–2023, obtained from the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) of DKI Jakarta Province and the national BPS. The data were processed using multiple linear regression analysis with the aid of EViews 12 software. The results show that the education level has a negative but statistically insignificant effect on the open unemployment rate in DKI Jakarta. Life expectancy has a positive and statistically insignificant effect on the open unemployment rate. Meanwhile, the provincial minimum wage has a negative and statistically significant effect on the open unemployment rate in the province. Simultaneously, education level, population size, and economic growth have a joint influence on the open unemployment rate in DKI Jakarta Province.

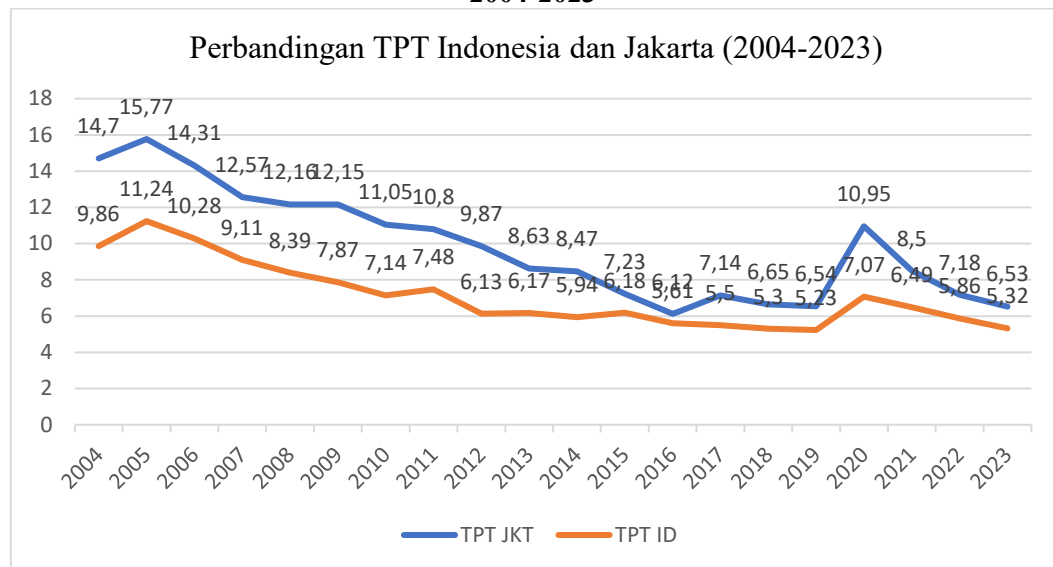
Keywords: Unemployment, Education, Life Expectancy, Minimum Wage, DKI Jakarta

1. PENDAHULUAN

Pengangguran pada saat ini merupakan salah satu permasalahan yang belum terpecahkan khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan mengenai pengangguran ini sudah terjadi sejak lama, dan terus mengalami kenaikan. Dimana angkatan kerja semakin bertambah tetapi lowongan kerja semakin berkurang, yang tentunya berimbas pada penghambatan pembangunan negara.

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, DKI Jakarta menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Pandemi COVID-19 saat tahun 2020 mengakibatkan Tingkat Pengangguran di Jakarta mencapai angka 10,95%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan angka pengangguran menjadi 6,53%, meskipun terjadi pemulihan ekonomi, angka pengangguran di DKI Jakarta tetap melebihi angka rata-rata nasional, sebesar 5,32% pada Agustus 2023.

Gambar 1
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan DKI Jakarta
2004-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Perbandingan tingkat pengangguran di DKI Jakarta dan tingkat pengangguran nasional Indonesia dari tahun 2004 - 2023 mengungkapkan adanya permasalahan signifikan, yaitu angka pengangguran di DKI Jakarta yang konsisten lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran nasional.

Tingkat pendidikan merupakan faktor penentu utama angka pengangguran; pendidikan yang memadai menjadi modal dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas kerja dan produktivitas individu. (Suhendra & Wicaksono, 2016). Pendidikan didalam studi ini dinilai melalui rata-rata lama sekolah.

Kondisi kesehatan turut berperan dalam menentukan tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini, variabel kesehatan diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH digunakan karena merepresentasikan tingkat kesehatan penduduk dalam suatu wilayah guna menjadi hasil dari perkembangan di sektor Kesehatan (Laksono, 2013).

Upah minimum provinsi juga menjadi indikator ekonomi yang berperan dalam memengaruhi angka pengangguran. Dalam beberapa situasi, lonjakan upah minimum ini malah mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan atau beralih ke otomatisasi. Akibatnya, tingkat pengangguran pun meningkat. Penurunan pendapatan memaksa pengangguran untuk mengurangi konsumsi, sehingga menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan (Nurcholis, 2014).

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris pengaruh tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta periode 2004-2023. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka pengangguran di suatu provinsi. Memahami faktor-faktor pengangguran secara komprehensif memungkinkan pemerintah merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan terarah.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan instrumen vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Konsep ini mencakup serangkaian strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan.

Perencanaan pembangunan yang efektif dapat membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola ekonomi serta sosial (Rondinelli, 1979). Istilah "perencanaan pembangunan" mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Tjokroamidjojo, 1984). Definisi lain dari perencanaan pembangunan adalah tindakan memikirkan dan memutuskan langkah-langkah yang menyeluruh, dipertimbangkan dengan

matang, dan diatur secara metodis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang (Soekartawi, 1990).

Tujuan dari perencanaan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mendorong pembangunan yang efisien, terarah, dan terkoordinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita katakan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses penentuan secara sistematis mengenai cara terbaik mengalokasikan sumber daya pembangunan guna memfasilitasi pelaksanaan berbagai inisiatif pembangunan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup.

2.2 Pengangguran

Salah satu masalah ekonomi makro yang mengancam keberadaan manusia adalah pengangguran. Pengangguran, menurut sebagian besar standar internasional, didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu karena tidak ditemukan pekerjaan yang sesuai untuk mereka.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) pengangguran adalah mereka yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang dalam proses memulai usaha baru. Sedangkan menurut Sukirno (1994), pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya.

Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa taraf hidup mereka menurun ketika mereka kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika politisi sering mengangkat topik pengangguran dalam debat mereka, dengan banyak yang berpendapat bahwa kebijakan mereka dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru (Mankiw, 2000).

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Salah satu teori yang berkaitan dengan pengangguran adalah teori pasar tenaga kerja. Dalam teori Keynes, pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output (Q) naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment (N) juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Proses menuju ekuilibrium yang baru, dalam kenyataan, memakan waktu yang kadang-kadang cukup lama, tergantung pada berapa besar hambatan-hambatan yang merintang proses tersebut. Hambatan-hambatan ini termasuk ketegaran dan fleksibilitas yang tidak sempurna dari harga-harga dan (terutama) upah.

2.3 Pendidikan

Dalam hal pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan indikator utama. Pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Alhumami, 2004).

Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrument terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Salah satu ukuran kemajuan populasi menuju standar pendidikan yang lebih tinggi adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan dalam pendidikan formal. Rata-rata masa sekolah yang lebih lama menunjukkan pencapaian pendidikan yang lebih baik.

2.4 Kesehatan

Kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di Indonesia adalah kesehatan yang buruk. Seseorang dengan tingkat kesehatan yang buruk, akan pasti mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pengobatannya, sedangkan status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, dan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara.

Kesehatan diartikan sebagai kondisi kesejahteraan yang utuh secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan penyakit atau kelemahan (WHO, 1947). Kesehatan

merupakan suatu kondisi di mana individu tidak menunjukkan adanya keluhan, tanda, maupun gejala penyakit saat dilakukan pemeriksaan medis (White, 1977).

Salah satu indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir pada tahun tertentu. Meningkatnya harapan hidup sehat rata-rata merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah menuju kondisi kesehatan dan sosial yang lebih baik. Peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi cenderung berkorelasi positif dengan naiknya AHH. Lebih lanjut, Anggraini & Lisyarningsih (2013) menyatakan bahwa AHH memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah, mengingat kesehatan penduduk menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Upah

Upah merupakan hak yang dinikmati oleh pekerja atau buruh sebagai imbalan berupa uang dari pengusaha atau pemberi kerja. Merujuk pada penjabaran dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah jenis uang yang dibayarkan pemberi kerja kepada karyawannya sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Normalitasari, 2012). Istilah "upah" juga dapat merujuk pada manfaat moneter atau non-moneter yang diterima karyawan dari pemberi kerja mereka sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan. Pekerja dan keluarga mereka akan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan penghargaan ini. Pekerja mendapatkan gaji dari pemberi kerja mereka sebagai imbalan atas kerja keras yang mereka lakukan, menurut teori ekonomi (Sukirno, 2013).

Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kewajiban dan keputusan saat menetapkan upah agar karyawan mendapatkan gaji yang sepadan dengan usaha mereka. Upah terbagi menjadi 5 yakni, upah nominal, upah nyata (*real wages*), upah hidup, upah minimum dan upah wajar.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2004 hingga 2023, yang dihimpun dari instansi BPS Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada studi ini dilakukan dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder yang sudah ada di situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), adalah penduduk usia kerja yang saat ini menganggur dan sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. TPT merupakan presentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS). Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk umum yang produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Data yang digunakan adalah presentase TPT di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga 2023 dalam satuan persen.

Tingkat Pendidikan (X_1), merupakan lama jumlah tahun belajar penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk mengetahui berapa lama penduduk biasanya bersekolah, kita dapat melihat rata-rata lama sekolah. Data yang digunakan adalah rata-rata tahun yang dihabiskan di sekolah di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga 2023 dalam satuan persen.

Angka Harapan Hidup (X_2), adalah estimasi rata-rata umur yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang mencerminkan peluang hidup yang tersisa bagi individu yang masih hidup hingga mencapai usia tertentu, berdasarkan tingkat mortalitas di masyarakat. Data yang digunakan adalah angka harapan hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2004 hingga 2023, yang diukur dalam satuan tahun.

Upah Minimum Provinsi (X_3), adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di suatu daerah, berdasarkan standar hidup daerah tersebut. Data yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2004-2023 yang diukur dalam satuan rupiah.

3.4 Metode Analisis

Studi ini menerapkan analisis kuantitatif melalui penerapan regresi linear berganda, di mana variabel dependen dalam studi ini yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sementara variabel

independennya meliputi Tingkat Pendidikan (TP), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dari variabel tersebut dapat dibuat menjadi bentuk fungsional seperti berikut ini:

$$TPT = F(TP, AHH, UMP) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dari bentuk fungsional di atas, persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$TPT_t = \beta_0 + \beta_1 TP_t + \beta_2 AHH_t + \beta_3 UMP_t + e_t \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

TP = Tingkat Pendidikan

AHH = Angka Harapan Hidup

UMP = Upah Minimum Provinsi

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Konstanta

e = Error Term

t = Time Series

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Jarque-Bera dalam aplikasi Eviews. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dapat dilihat dengan membandingkan nilai Probabilitas J-B (Jarque-Bera) hitung dengan $\alpha = 0,05$ (5%).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik yaitu jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati & Porter, 2013).

3.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (times series). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Breusch-Godfrey LM (Lagrange Multiplier) Test.

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial (uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Sebelum mengetahui hasil uji t maka diperlukan mengetahui nilai t tabel terlebih dahulu.

3.6.2 Uji Simultan (uji F)

Uji F dikenal dengan Uji bersama, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel independen dan dependen memiliki pengaruh satu sama lain secara bersamaan (Ghozali, 2016).

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Zulfikar & Budiantara, 2014). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Estimasi Regresi Persamaan Substruktur I

Variance	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-165.4410	128.5925	-1.286552	0.2166
RLS	-0.664077	4.875933	-0.136195	0.8934
AHH	2.579846	2.390201	1.079343	0.2964
UMP	-1.97E-06	5.71E-07	-3.452280	0.0033
R - squared	0.717606	$E_1 = 1 - 0.717606 = 0.288394$		
F - statistic	13.55284			
Prob (F - statistic)	0.000117	$DF_1 = 20 - 4 = 16$		

Sumber: Data Olahan, 2025

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 12 untuk mengetahui pengaruh antara Tingkat Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

$$TPT = -165,4410 - 0,664077RLS + 2,579846AHH - 0,00000197UMP + et$$

4.1.2 Hasil Uji Hipotesis

4.1.2.1 Hasil Uji Parsial (uji t)

Rata-rata Lama Sekolah, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1, koefisien Rata-rata Lama Sekolah mencapai -0,664077, menunjukkan adanya korelasi negatif dengan Tingkat Pengangguran. Nilai probabilitas sebesar 0,8934 > 0,05, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Penguatan temuan ini terlihat pada t-statistik sebesar -0,136195, yang lebih kecil daripada nilai t tabel (-1,746). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) dapat ditolak.

Angka Harapan Hidup, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1, koefisien Angka Harapan Hidup mencapai 2,579846, menunjukkan adanya korelasi positif dengan Tingkat Pengangguran. Nilai probabilitas sebesar 0,2964 > 0,05, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Penguatan temuan ini terlihat pada t-statistik sebesar 1,079343, yang lebih kecil daripada nilai t tabel (1,746). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) dapat ditolak.

Upah Minimum Provinsi, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1, koefisien Upah Minimum Provinsi mencapai -0,00000197, menunjukkan adanya korelasi negatif dengan Tingkat Pengangguran. Nilai probabilitas sebesar 0,0033 < 0,05, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Penguatan temuan ini terlihat pada t-statistik sebesar -3,452280, yang lebih besar daripada nilai t tabel (-1,746). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

4.1.2.2 Hasil Uji Simultan (uji F)

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa secara bersama-sama variabel Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Upah Minimum Provinsi memiliki hubungan yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat F-statistic sebesar 13,55284 > F tabel sebesar 3,239 dan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000117 < 0,05, oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Rata-rata

Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil output regresi pada tabel 4.1, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,717606. Hal ini menunjukkan bahwa 71% variasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dijelaskan oleh Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Upah Minimum Provinsi di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 29% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah uji Prob. Jarque-Bera (JB) dengan *histogram-normality test*. Apabila nilai Prob. J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai prob. J-B hitung lebih kecil dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal (Mansuri, 2016).

Tabel 2
Uji Normalitas

Probability	Keterangan
0,153392	Normal

Sumber: Data Olahan, 2025

Hasil output uji normalitas pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) sebesar $0,153392 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai $VIF > 10$, maka terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$, tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
RLS (X1)	15,50216
AHH (X2)	8,017556
UMP (X3)	4,437956

Sumber: Data Olahan, 2025

Dapat dilihat pada Nilai VIF untuk RLS sebesar $15,50216 > 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah multikolinearitas. Meskipun demikian, keberadaan multikolinearitas tidak serta merta menjadi indikasi adanya masalah serius. Multikolinearitas kerap ditemukan dalam analisis regresi yang menggunakan data time series, terutama ketika variabel dalam model menunjukkan tren serupa, seperti kecenderungan meningkat atau menurun seiring waktu (Gujarati & Porter, 2013). Namun pada skripsi penulis tetap mempertahankan variabel RLS dianggap penting analisis karena rata-rata lama sekolah merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang dapat mencerminkan tingkat pendidikan penduduk, yang sangat berkaitan dengan produktivitas dan kemampuan bersaing tenaga kerja di pasar kerja.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji untuk melihat apakah model regresi mengandung heteroskedastisitas dilakukan Uji Glesjer, apabila nilai jika nilai Prob. Chi-Square $> 0,05$, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai Prob. Chi-Square $< 0,05$, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Prob. Chi-Square	0,9007
------------------	--------

Sumber: Data Olahan, 2025

Hasil uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar $0,9007 > 0,05$, menunjukkan kesimpulan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, dilakukan uji Breusch-Godfrey atau disebut dengan uji Lagrange-Multiplier (LM Test). Jika nilai Prob. Chi-Square $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Prob. Chi-Square $< 0,05$, dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Prob. Chi-Square	0,0526
------------------	--------

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan uji LM Test, dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar $0,0526 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa terbebas masalah autokorelasi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Rata-rata Lama Sekolah (X1) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori human capital dimana investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga mampu berinovasi di dunia kerja dan pengangguran berkurang (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta karena beberapa faktor. Pertama, faktor-faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur pasar tenaga kerja, upah minimum, dan kondisi sektor industri di Jakarta lebih dominan dalam menentukan tingkat pengangguran.

4.2.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Angka Harapan Hidup (X2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, meskipun angka harapan hidup mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, namun variabel ini bukan merupakan faktor penentu utama dalam menjelaskan variasi tingkat pengangguran terbuka.

Angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta karena angka harapan hidup lebih merefleksikan kondisi kesehatan dan kualitas hidup jangka panjang masyarakat, yang secara langsung tidak berhubungan dengan kemampuan angkatan kerja untuk masuk atau bertahan di pasar kerja. Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, struktur pasar tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja lebih dominan memengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup biasanya terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dampaknya terhadap perubahan pasar tenaga kerja cenderung lambat dan tidak langsung.

4.2.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Upah Minimum Provinsi (X3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa kondisi upah minimum provinsi suatu daerah yang meningkat akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut. Menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong partisipasi tenaga kerja dan menciptakan kondisi pasar kerja yang lebih stabil. Di sisi lain, peningkatan upah minimum tidak selalu berdampak buruk bagi penyerapan tenaga kerja, melainkan dapat memotivasi pencari kerja dan meningkatkan daya beli yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.
2. Secara parsial Angka Harapan Hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.
3. Secara parsial Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.
4. Secara simultan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, A. (2004). Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi. *Harian Kompas*.
- Anggraini, E., & Lisyaningsih, U. (2013). Disparitas Spasial Angka Harapan Hidup Di Indonesia Tahun 2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3).
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indikator Ketenagakerjaan. *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Laksono, A. (2013). *Menuju Indonesia Emas: Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, dan Sejahtera*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mansuri. (2016). *Modul Praktikum Eviews (Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- Normalitasari, H. (2012). *Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Rondinelli, D. A. (1979). Planning development projects: lessons from developing countries. *Long Range Planning*, 12(3). [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(79\)80007-2](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(79)80007-2)

- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. The American Economic Review.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Suhendra, I., & Wicaksono, B. H. (2016). Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B. (1984). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- White, K. D. (1977). *Country Life in Classical Times*. Cornell University Press.
- World Health Organization. (1947). *Definisi Sehat WHO: WHO; 1947*.
- Zulfikar, & Budiantara, I. N. (2014). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Deepublish.